

**“PENYAMPAIAN INFORMASI UPTD PP LEMPASING SYAHBANDAR  
SEBAGAI UPAYA KESELAMATAN NELAYAN DALAM BERLAYAR”**

**Tugas Akhir**

**Oleh**

***Sekar Nur Dzakhirah***  
**1806071010**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **PENYAMPAIAN INFORMASI UPTD PP LEMPASING SYAHBANDAR SEBAGAI UPAYA KESELAMATAN NELAYAN DALAM BERLAYAR**

**Oleh**

**Sekar Nur Dzakhirah**

Komunikasi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dimana saja, oleh siapa saja, dengan siapa saja baik pribadi maupun berkelompok. Dengan komunikasi, manusia mengenal satu sama lain. Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya terdapat perbedaan dalam berkomunikasi. Masyarakat yang tinggal dipedesaan, perkotaan maupun pesisir tentunya mempunyai kebiasaan dan budaya yang berbeda dalam menjalani realitas sebagai makhluk sosial, dalam mempertahankan kehidupan manusia berusaha mempertahankan kehidupan dengan berbagai bentuk pekerjaan dan profesi. Komunikasi sangat penting dilaksanakan, untuk itu pemahaman tentang konsep dasar komunikasi agar bisa dimengerti dan pahami.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah strategi yang dilakukan Syahbandar Pelabuhan Perikanan Lempasing agar nelayan dapat memahami dan mentaati informasi keselamatan dalam berlayar. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penulisan Tugas Akhir ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi Humas yang digunakan Dinas Perikanan dan Syahbandar Kecamatan Lempasing dalam penyampaian informasi yaitu dengan cara melakukan komunikasi terbuka berupa sosialisasi, pemberian berbagai macam keperluan yang di perlukan oleh masyarakat nelayan serta melakukan publikasi. Komunikasi terbuka dilakukan dengan tujuan untuk membangun hubungan dengan mendengarkan masukan dari masyarakat nelayan sehingga keluhan ataupun keperluan masyarakat nelayan dapat di aspirasikan .

**Kata kunci : Keselamatan Berlayar, Syahbandar, Komunikasi, Informasi**

**“PENYAMPAIAN INFORMASI UPTD PP LEMPASING SYAHBANDAR  
SEBAGAI UPAYA KESELAMATAN NELAYAN DALAM BERLAYAR”**

Oleh

*Sekar Nur Dzakhirah*

**Tugas Akhir**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**Ahli Madya (A.Md)**

Pada

Program Studi D III Hubungan Masyarakat  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**



Judul Tugas Akhir : **PENYAMPAIAN INFORMASI SEBAGAI  
UPAYA KESELAMATAN NELAYAN  
DALAM BERLAYAR**

Nama Mahasiswa : **Sekar Nur Dzakhirah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1806071010**

Program Studi : **D III Hubungan Masyarakat**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



2. Ketua Program Studi

*[Handwritten Signature]*

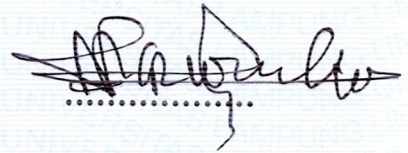
**Agung Wibawa, S.Sos., M.Si.**  
NIP 19810926 200912 1 004



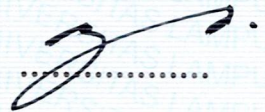
**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Sarwoko M.Si**



Penguji Umum : **Agung Wibawa, S.Sos., M.Si.**



2. Dekan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Tugas Akhir: **20 April 2022**



## PERNYATAAN

Nama : Sekar Nur Dzakirah  
NPM : 1806071010  
Program Studi : D3 Hubungan Masyarakat  
Alamat : Jl. Sriwijaya Blok B1 No 24 Kemiling

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul **“PENYAMPAIAN INFORMASI SEBAGAI UPAYA KESELAMATAN NELAYAN DALAM BERLAYAR”** adalah benar hasil karya saya sendiri bukan plagiat (milik orang lain) atau dibuatkan orang lain. Apabila dikemudian hari hasil penulisan Tugas Akhir saya ada pihak lain yang merasa keberatan dan siap dicabut gelar akademik saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dalam keadaan sadar, dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, April 2022  
Yang membuat pernyataan



**Sekar Nur Dzakira**  
NPM : 1806071010

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Sekar Nur Dzakirah lahir di Bandar Lampung pada tanggal 1 Oktober 1999 merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang merupakan putri dari pasangan Bapak Tri Bardiantoro dan Ibu Sumarjilah.

Jenjang pendidikan penulis bermula dari Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung pada tahun 2006 sampai tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 14 Bandar Lampung pada tahun 2012 sampai tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2015 sampai tahun 2018. Pada tahun 2018, penulis melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi dan tercatat di salah satu Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Lampung (UNILA) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan konsentrasi jurusan Ilmu Komunikasi Program Studi D3 Humas melalui jalur Vokasi.

Bandar Lampung, Maret 2022

Hormat Saya,

Sekar Nur Dzakirah

**MOTTO**

**Berhenti kutuki kegelapan, mulailah nyalakan lilin.**

**(Anies Baswedan)**

**Tidak masalah jika kamu berjalan dengan lambat, asalkan kamu tidak pernah berhenti berusaha.**

**(Confucius)**



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil'alamin dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada :

1. Ibu, Bapak, Kakak dan adik tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu, Bapak, kakak dan adik yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu, Bapak, Kakak dan adik bahagia, karna ku sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih.
2. Keluarga besar dan teman-teman yang selalu memberikan motivasi-motivasi yang baik untuk selalu berjuang demi cita-cita.
3. Almamater Universitas Lampung (UNILA).

## SANWACANA

*Bismillahirrohmanirrohim*, puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas askhir ini sebagai salah satu syarat dalam Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Sholawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, para kerabat, sahabat, dan pengikutnya hingga hari ini. Semoga kita semua mendapatkan safa'atnya di hari kiamat nanti dan semoga kita termasuk golongan yang senantiasa dekat dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupu tidak langsung telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Agung Wibawa, S.Sos. M.Si selaku Ketua Program Studi D III Hubungan Masyarakat Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Sarwoko M.Si. selaku pembimbing tugas akhir yang dengan penuh kesabaran telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingannya dan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen pengajar Program Studi Hubungan Masyarakat Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama di bangku perkuliahan. Serta seluruh staff atau karyawan yang telah membantu menyelesaikan administrasi.



6. Bapak dan Ibu tercinta serta kakak dan adiku yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat, kasih sayang dan segala yang terbaik untuk penulis.
7. UPTD PP Lempasing dan Syahbandar, Pak A.Faisal, Pak Okta Indra, Pak Apri, Pak manto, Ibu Santi, Ibu Weni, dan seluruh pegawai yang telah berkenan memberikan informasi dan data untuk kebutuhan penulis, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Humas 2018 terkhususnya Ragil, Yoga, Hafid, Rifki, yang selalu membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kakak tingkat Humas terima kasih sudah membantu memberikan ide, saran dan masukan untuk penulisan tugas akhir ini. Semoga kalian kedepannya bisa jauh lebih sukses dari sekarang.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
SANWACANA.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Pengumpulan Data.....	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1 Definisi Humas .....	7
2.1.1 Fungsi Humas .....	8
2.1.2 Peran Humas.....	9
2.2 Strategi .....	10
2.2 Strategi Humas .....	11
2.2 Komunikasi .....	13
2.3.1 Strategi Komunikasi .....	14
2.3.1 Informasi Dalam Komunikasi .....	15



2.3 Definisi Keselamatan Kerja .....	17
2.4 Konsep Prilaku .....	19
2.4.1 Prilaku Nelayan .....	19
2.4.2 Prilaku Keselamatan Kerja .....	20
2.5 Identifikasi Potensi Bahaya pada Nelayan.....	21
2.6 Mekanisme Penanganan Kecelakaan Kerja.....	28
BAB III .....	29
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	29
3.1 Profil Instansi.....	29
3.1.1 Sejarah Singkat Instansi .....	29
3.1.2 Logo UPTD PP Lempasing.....	29
3.2 Visi dan Misi.....	30
3.3 Struktur Organisasi .....	31
3.4 Tugas Dan Wewenang Syahbandar .....	33
3.5 Prosedur Dalam Berlayar.....	36
BAB IV .....	41
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Hasil .....	41
4.2 Pembahasan .....	44
BAB V.....	46
PENUTUP.....	46
5.1 Kesimpulan .....	46
5.2 Saran .....	47
DAFTAR PUSTAKA .....	48
LAMPIRAN .....	52

## DAFTAR TABEL

TABLE 2.1 AKTIVITAS NELAYAN PELABUHAN PANTAI LEMPASING .....	22
TABLE 2.2 POTENSI BAHAYA AKTIVITAS PERSIAPAN DI DARAT .....	23
TABLE 2.3 POTENSI BAHAYA AKTIVITAS BONGKAR MUAT.....	24
TABLE 2.4 POTENSI BAHAYA MENUJU DAERAH PENANGKAPAN .....	25
TABLE 2.5 POTENSI BAHAYA AKTIVITAS PERSIAPAN ALAT TANGKAP.....	25
TABLE 2.6 POTENSI BAHAYA AKTIVITAS PENURUNAN ALAT TANGKAP.....	26
TABLE 2.7 POTENSI BAHAYA AKTIVITAS PENGANGKATAN ALAT TANGKAP .....	26
TABLE 2.8 POTENSI BAHAYA AKTIVITAS BERLAYAR MENUJU PELABUHAN.....	27
TABLE 2.8 POTENSI BAHAYA AKTIVITAS UNLOADING .....	27

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 LOGO PELABUHAN PERIKANAN .....	29
GAMBAR 2 STRUKTUR ORGANISASI UPTD PP LEMPASING .....	33
GAMBAR 3 FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN .....	42
GAMBAR 4 FOTO ALAT PEMANTAU CUACA.....	44



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai satu kesatuan kehidupan di nusantara, Indonesia dikelilingi oleh laut, dan transportasi laut memainkan peran strategis yang signifikan dalam pengetahuan, perdagangan, dan keamanan nasional nusantara. Dengan melihat fakta yang ada di wilayah Indonesia, agar dapat mendukung terwujudnya wawasan nusantara perlu diupayakan pemanfaatan perairan Indonesia dengan baik. Pemanfaatan laut oleh bangsa Indonesia sangat penting dilakukan guna menjaga kelangsungan hidup serta membangun kehidupan bernegara. Maka dari itu Indonesia membutuhkan tenaga laut yang dicirikan sebagai keahlian suatu bangsa didalam mengalokasikan segala sumber energi serta peluang yang ditawarkan oleh laut untuk memenuhi kebutuhan warganya serta menggunakan kekuatan laut (Roesli, 1988: 160-162). Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang menjunjung tinggi regulasi pelayaran nasional.

Tujuan aturan ini adalah untuk menjamin keamanan dan stabilitas kekuasaan negara. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Transportasi memiliki tujuan dengan memprioritaskan dan melindungi transportasi di perairan dari pergeseran manusia atau benda di maritim untuk mempercepat kegiatan ekonomi negara, membangun jiwa kebaharian, mengembangkan industri transportasi perairan nasional dengan menjaga kedaulatan nasional dan membangun daya saing, mendukung, mendorong dan mengajak terwujudnya pembangunan nasional yang bermaksud dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan negara keilmuan nusantara serta memajukan pertahanan negara (Djohan, 2008).

Tujuan pelayaran dapat ditentukan secara jelas berdasarkan tujuan pelayaran, yang meliputi membagikan proteksi pertahanan serta keamanan untuk negara dan masyarakat, serta mengembangkan ekonomi negara. Syarat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bisa diperluas untuk semua operasi transportasi laut, pelabuhan, serta keselamatan serta perlindungan pelayaran, dan pelestarian lingkungan laut Indonesia. Lebih lanjut, dilihat dari undang-undang ini memberikan perlindungan bukan saja hanya diinternal perairan Indonesia, tapi termasuk eksternal perairan Indonesia untuk seluruh kapal berisikan bendera Indonesia. Undang-undang ini mengacu pada setiap kapal luar negara Indonesia yang tidak berisikan bendera Indonesia berlayar di wilayah maritim Indonesia dengan bendera asing.

Di wilayah maritim Indonesia, negara memiliki kendali penuh atas perkapalan, serta pelaksanaan negara dilaksanakan oleh pemerintah terhadap pembinaan serta juga pelaksanaan negara. Regulasi, pemantauan, dan pengawasan adalah mekanisme yang digunakan pemerintah untuk memberikan pedoman keselamatan dan keamanan diatur dan diawasi pelayaran melalui navigasi untuk menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran dimana pemerintah telah membentuk fasilitas navigasi agar pelayaran dapat beroperasi dengan lancar dan aman. Meski sudah ada tindakan perlindungan keselamatan di perairan, namun penerapan tindakan perlindungan keselamatan masih belum cukup, seperti penerbitan sertifikat transportasi kapal dan sertifikat kelayakan transportasi kapal yang belum sepenuhnya diperiksa. Jika kapal tidak diinspeksi secara menyeluruh maka keselamatan yang dibutuhkan akan berkurang dan akan menimbulkan bahaya serta menimbulkan korban pada suatu waktu.

Lampung adalah provinsi yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, yang memiliki luas wilayah 35.288,35 km<sup>2</sup>. Provinsi Lampung terletak pada 6°45' sampai 3°45' LS dan 103°40' sampai 105°50' BT, yang artinya berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan

di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Pada perairan tersebut terkandung potensi perikanan tangkap diperkirakan lebih dari 380.000 ton/tahun. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lempasing merupakan salah satu wilayah yang berbatasan dengan Teluk Lampung dan menjadi penghasil ikan laut yang dapat diandalkan di Provinsi Lampung.

Pelabuhan Lempasing di Provinsi Lampung memegang peranan penting sebagai basis perikanan dalam menunjang perkembangan usaha perikanan terutama penangkapan ikan yang semakin berkembang. Adanya Pelabuhan Perikanan, maka aktivitas-aktivitas perikanan tangkap akan lebih teratur dan terarah. Pelabuhan Perikanan bukan hanya sebatas menyediakan fasilitas untuk aktivitas pendaratan, pengolahan dan pendistribusian. Selain itu dibantu dalam pengurusan dokumen yang dikeluarkan oleh Syahbandar perikanan untuk memberikan Layanan dalam penerbitan surat-surat penting kapal, 3 dari bentuk pelayanan yang diberikan oleh pihak Syahbandar perikanan kepada nelayan adalah Layanan penerbitan surat penting kapal seperti SPB dan SLO. Layanan penerbitan tersebut berupa ketetapan hari terbit, dan terbukanya informasi. Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 56 tentang pelayaran, Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan dalam berlayar.

Sesuai dengan perkembangan zaman, cara kerja nelayan pun berkembang yang semula hanya bekerja di permukaan laut, sekarang banyak yang bekerja didalam laut bahkan sampai pada dasar laut untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, pekerjaan sebagai nelayan memiliki tingkat risiko bahaya dan sangat tinggi tergantung kondisi cuaca dan hempasan angin yang

tidak menentu merupakan kondisi yang sangat sulit bagi nelayan untuk dihadapi pada saat penangkapan ikan. Adapun 3 faktor yang menjadi penyebab seringnya terjadi kecelakaan pada saat berlayar oleh nelayan tradisional dan pengguna transportasi laut, yaitu (1) rancang bangun perahu yang buruk, (2) kepedulian terhadap keselamatan yang rendah, serta (3) minimnya tentang ilmu penangkapan ikan dan kepelautan. Oleh karena itu, penanganan dan pengendalian kecelakaan kerja yang dapat dilakukan adalah dengan cara menanamkan pemahaman risiko untuk menghindari kecelakaan pada saat bekerja.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih mengenai “PENYAMPAIAN INFORMASI UPTD PP LEMPASING SYAHBANDAR SEBAGAI UPAYA KESELAMATAN NELAYAN DALAM BERLAYAR”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Syahbandar pelabuhan perikanan lempasing dalam memberikan pemahaman peraturan dalam berlayar (Sebelum, Pada saat, Dan setelah melaut)?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam menyampaikan informasi keselamatan berlayar guna meminimalisir terjadinya kecelakaan dalam bekerja?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Syahbandar pelabuhan perikanan lempasing dalam memberikan pemahaman peraturan tentang (Sebelum, Pada saat, Dan setelah melaut).



2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam menyampaikan informasi keselamatan berlayar guna meminimalisir terjadinya kecelakaan dalam bekerja.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Menambah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi mengenai keselamatan dalam berlayar bagi masyarakat nelayan.
2. Memberikan informasi bagi kampus tentang prosedur ataupun peraturan masyarakat nelayan dalam berlayar.
3. Sebagai pengalaman yang berharga bagi penulis dalam rangka memperluas wawasan pengetahuan mengenai pentingnya memahami sebuah informasi.

#### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penulisan Tugas Akhir ini adalah:

##### **1. Teknik Observasi**

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati Langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat Penelitian itu dilakukan. Observasi juga bisa diartikan sebagai proses yang Yang kompleks. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis pada saat melakukan Praktik Kerja Lapangan di UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing selama 40 hari dimulai pada tanggal 11 januari sampai 5 maret 2021.

##### **2. Teknik Wawancara**

Metode wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab secara langsung. Hal ini dilakukan untuk menggali data, alasan, opini, atas suatu peristiwa, baik yang sudah berlangsung maupun yang

sedang berlangsung. Dalam teknis pelaksanaannya peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, yang maksudnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan bebas dimana penulis hanya menggunakan garis-garis besar pertanyaan yang berkenaan dengan penelitian. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Okta Lindra Saputra. S.St.Pi.,MM sebagai kepala Syahbandar.

### 3. Teknik Dokumentasi

Dalam metode dokumentasi ini digunakan ketika mencari data dari subjek yang berupa tulisan. Dalam teknik dokumentasi, penulis mendapatkan dokumen-dokumen tentang berdirinya syahbandar, visi, misi, dan sebagainya yang dilakukan syahbandar pelabuhan perikanan lempasing.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Definisi Humas

*Public relations* adalah sebagai landasan teknik dan teori yang digunakan untuk menyesuaikan hubungan dengan publik sesuai pokok masalahnya. *Public relations* sebagai landasan teori dan teknik mepresentasikan penggunaan sosiologi, psikologi sosial, ilmu pengetahuan politik dan ekonomi, seperti juga keterampilan-keterampilan khusus dari wartawan, seniman-seniman, ahli-ahli organisatoris, praktis periklanan, dll, agar dapat melibatkan secara khusus pada bidang permasalahan tertentu. (Danandjaja, 2011:14).

Selanjutnya, Pada 1973 Bertram R. Canfield & Frazier Moore mendefinisikan, *public relations* merupakan falsafah sosial dari manajemen yang dinyatakan dengan kebijaksanaan dan mempraktekkan melalui komunikasi timbalbalik dengan publik, berusaha untuk menjamin adanya saling pengertian dan kerja sama. (Danandjaja, 2011:15)

Denny Griswold menjelaskan, suatu fungsi manajemen yang menilai sikap publik, menunjukkan kebijaksanaan dan prosedur dari seorang individu atau sebuah lembaga atas dasar kepentingan publik, merencanakan dan menjalankan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan dapat diterima dengan baik oleh publik. (Danandjaja, 2011:16)

Lebih lanjutnya, Menurut Oemi, Public Relations adalah seni menciptakan pengertian public yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan public terhadap suatu individu atau organisasi , bias ditulis dengan singkat menjadi PR, dan lazim disebut Parel atau

hubungan masyarakat , masih merupakan bidang baru, terutama di Indonesia.

Dalam pertemuan di Mexico City yang dihadiri oleh wakil-wakil dari pakar humas/ Public Relations dari Negara maju ditetapkan defenisi-definisi humas yang lebih singkat, yang dinamakan The Statement of Mexico. Definisi itu adalah “Public Relations adalah seni dan ilmu pengetahuan sosial yang dapat dipergunakan untuk menganalisis kecenderungan, memprediksi konsekuensinya, menasehati para ahli pemimpin organisasi, dan melaksanakan program yang terencana mengenai kegiatan-kegiatan yang melayani, baik kepentingan organisasi maupun kepentingan public atau umum”

Dari berbagai batasan Public Relations dapat ditarik konsep bahwa PR berfungsi untuk memahami dan mengevaluasi berbagai opini/public ataupun isu public yang berkembang terhadap suatu organisasi/perusahaan. (Mukarom,2015:45-47).

### **2.1.1 Fungsi Humas**

Fungsi adalah harapan publik terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh *public relations* sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang *public relations*. Jadi, *public relations* dikatakan berfungsi apabila dia mampu melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik, berguna atau tidak dalam menunjang tujuan perusahaan dan menajmin kepentingan publik. Secara garis besar fungsi Humas (*public relations*) adalah :

1. Memelihara komunikasi yang harmonis antara perusahaan dengan publiknya
2. Melayani kepentingan public dengan baik



3. Memelihara perilaku dan moralitas perusahaan dengan baik  
Sedangkan Cultip & Center menyebut fungsi *public relations* sebagai berikut :

- a) Menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi.
- b) Menciptakan komunikasi dua arah secara public balik dengan menyebarkan informasi dari perusahaan kepada public dan menyalurkan opini public kepada perusahaan.
- c) Melayani public dan memberikan nasihat kepada pimpinan perusahaan untuk kepentingan umum.
- d) Membina hubungan secara harmonis antara perusahaan dan public, baik internal maupun eksternal.

### 2.1.2 Peran Humas

Peran *Public Relations* menurut Dozier dan Broom (2000) adalah

1. Penasihat Ahli (*Expert Prescriber*)  
Seorang praktisi *public Relations* yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencari solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan public.
2. Fasiliator Komunikasi (*Communication Faciliator*)  
Praktisi *public Relations* bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal mendengarkan keinginan dan harapan publiknya.
3. Fasiliator Proses Pemecahan Masalah (*Problem Solving Process Facilitator*)

Peranan praktisi *public relations* dalam pemecahan masalah merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi, baik sebagai penasihat (advisor), mengambil tindakan eksekusi (keputusan) dalam mengatasi persoalan maupun krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan professional.

#### 4. Teknisi Komunikasi (*Communication Technichian*)

Peranan communications menjadikan praktisi *public relations* sebagai *journalist in resident*, yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi. (Mukarom, 2015:56-57)

## 2.2 Strategi

Perkataan strategi berasal dari kata Yunani *strategos* yang di artikan sebagai “The art of the general” .Jauh sebelum abad ke 19 nampak bahwa kemenangan sesuatu bangsa atas peperangan banyak tergantung pada adanya panglima-panglima perang yang ulung dan bijaksana. Antoni Henri Jomini (1779-1869) dan Karl von Clausewitz (1780-1831) adalah diantaranya yang merintis dan memulai mempelajari strategi secara ilmiah. Jomini memberikan pengertian strategi yang bersifat deskriptif. Ia katakan bahwa strategi adalah seni menyelenggarakan perang di atas peta dan meliputi seluruh kawasan operasi. Sedangkan Clausewitz memberikan rumusan, bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk kepentingan perang. Jadi Clausewitz dengan tegas membedakan antara politik dan perang

Lain dari pada itu Liddle Hart, seorang Inggris yang hidup dalam abad ke-20 dan telah mempelajari sejarah perang secara global, mengatakan bahwa strategi adalah seni untuk mendistribusikan dan menggunakan sarana-sarana militer untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Strategi merupakan seni, oleh karena penglihatan dan pengertian itu memerlukan intuisi. Seakan akan orang harus “merasa” dimana ia sebaiknya menggunakan kekuatan yang tersedia dan bilamana ia sebaiknya melakukan itu. Tetapi di samping strategi merupakan seni,

lambat laun ia juga merupaka ilmu pengetahuan. Sebab dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat itu, pengaruhnya juga terasa dalam strategi dengan amat derasnya. Karena itu dapat dikatakan, bahwa strategi merupakan seni dan ilmu pengetahuan sekaligus.

Beberapa definisi yang dikemukakan antara lain :

1. Menurut, Thompson (1995) adalah sebagai cara untuk mencapai sebagai hasil akhir yaitu menyangkut tujuan dan sasaran organisasi.
2. Menurut Bennett (1996), sebagai arah yang dipilih organisasi untuk diikuti dalam mencapai misinya.
3. Menurut Mintzberg, menawarkan 5 kegunaan dari kata strategi, yaitu : (1) sebuah rencana, suatu tindakan yang diinginkan secara sadar, (2) sebuah cara, suatu maneuverspecific yang dimaksudkan untuk mengecoh lawan atau competition, (3) sebuah pola, dalam suatu rangkaian tindakan, (4) sebuah posisi, suatu cara menempatkan organisasi dalam sebuah lingkungan, dan (5) sebuah perspektif, suatu cara yang terintegrasi dalam memandang dunia.

Strategi komunikasi antara berbagai tingkat dalam organisasi harus konsisten. Seringkali terjadi keputusan strategis yang dibuat pada tingkat-tingkat yang berbeda kurang dipahami. Oleh karena itu, peran spesialis public relations adalah untuk memastikan bahwa konsistensi diterapkan secara menyeluruh, yang oleh politisi Inggris Peter Mandelson 'on message'

### **2.3 Strategi Humas**

Mengacu kepada pola strategi humas, maka menurut Ahmad S. Adnanputra yang dikutip oleh Ruslan, (2006:134) batasan pengertian tentang strategi humas adalah: "alternati optimal yang di tempuh guna mencapai tujuan humas dalam kerangka suatu rencana humas". Sebagaimana yang kita ketahui humas bertujuan menegakan dan

mengembangkan suatu “citra yang menguntungkan “ bagi organisasi atau perusahaan, atau produk barang dan jasa terhadap para stake holdernya sasaran yang terkait yaitu publik internal dan publik eksternal.

Adapun tahap-tahap kegiatan strategi humas:

1. Komponen sasaran, umumnya adalah stake holder dan publik yang mempunyai kepentingan yang sama. Sasaran umum tersebut secara struktural dan formal yang dipersempit melalui upaya segmentasi yang dilandasi “seberapa jauh sasaran itu menyanggah opini bersama, potensi, polemik, dan pengaruhnya bagi masa depan organisasi, lembaga ,nama perusahaan dan produk yang menjadi perhatian sasaran khusus” sasaran khusus disini adalah yang disebut publik sasaran (target publik).

2. Komponen sasaran yang pada strategi humas berfungsi untuk mengarahkan ketiga kemungkinan tersebut kearah posisi atau dimensi yang menguntungkan. Humas berfungsi menciptakan iklim yang kondusif dan mengembangkan tanggung jawab serta partisipasi antara pejabat humas dan masyarakat (khalayak sebagai sasaran) untuk mewujudkan tujuan bersama.

Fungsi tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa aspek-aspek pendekatan atau strategi humas :

1. Strategi Operasional Melalui pelaksanaan program humas yang dilakukan dengan pendekatan kemasyarakatan, melalui mekanisme sosial cultural dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dari opini publik atau kehendak masyarakat. Artinya humas mutlak bersikap atau berkemampuan untuk mendengar, dan bukan sekedar mendengar mengenai aspirasi yang ada di dalam masyarakat yang dianut.

2. Pendekatan Persuasif dan Edukatif Fungsi humas adalah menciptakan komunikasi dua arah (timbal balik) dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada pihak publiknya yang bersifat mendidik dan memberikan penerangan, maupun dengan melakukan pendekatan persuasif, agar tercipta saling pengertian, menghargai, pemahaman, toleransi dan lain sebagainya.



3. Pendekatan Tanggung Jawab Sosial Humas Menumbuhkan sikap tanggung jawab sosial bahwa tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tersebut bukan ditunjukkan untuk mengambil keuntungan sepihak dari publik sasaran (masyarakat), namun untuk memperoleh keuntungan bersama.

4. Pendekatan kerja sama Berupa membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan berbagai kalangan, baik hubungan kedalam (internal relations) maupun hubungan keluar (eksternal relations) untuk meningkatkan kerja sama. Humas berkewajiban memasyarakatkan misi instansi yang diwakilinya agar diterima dan mendapat dukungan dari masyarakat, dan untuk memperoleh opini publik serta perubahan sikap yang positif bagi kedua belah pihak (mutual understanding). Kasi

## 2.4 Komunikasi

Komunikasi berasal dari akar kata “*communico*” yang artinya membagi. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain (Onong, 2007: 4). Arni Muhammad mengatakan bahwa komunikasi adalah pertukaran pesan verbal maupun nonverbal antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku (Arni Muhammad, 2002: 4). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan atau audiens baik itu dalam bentuk simbol, lambang dengan harapan bias membawa atau memahami pesan itu kepada masyarakat serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu. Harold. D. Laswell mengemukakan bahwa dalam proses komunikasi harus mencakup kelengkapan dari unsur-unsur komunikasi sehingga menjadi efektif diterima. Unsur-unsur tersebut ialah :

a) Komunikator (*source/communicator*)

Komunikator ialah perorangan atau lembaga yang menyampaikan atau memberikan pesan kepada khalayak secara langsung maupun tidak langsung.

b) Pesan (*message*)

Pesan adalah materi yang disampaikan merupakan objek dari informasi yang menjadi bahasan.

c) Media (*channel/saluran*)

Media merupakan sarana penyampaian dan penerima pesan yang digunakan oleh komunikator maupun komunikan dalam menyampaikan pesan.

d) Komunikan (*communicant*)

Adalah perorangan ataupun lembaga yang menerima isi pesan, informasi dari pihak komunikator.

e) Efek (*impact/effect*)

Efek ialah hasil yang dapat dilihat sebagai pengaruh diterima atau ditolaknya suatu isi pesan/informasi.

### **2.4.1 Strategi Komunikasi**

Strategi komunikasi perlu disusun secara baik sehingga taktik operasional komunikasi dapat segera disesuaikan dengan faktor-faktor yang terpengaruh. Dalam konteks komunikasi, untuk menyusun strategi komunikasi ada empat faktor yang harus diperhatikan (Fajar, 2009: 183), yaitu :

#### **1. Mengenal Khalayak**

Mengenal khalayak merupakan langkah pertama bagi komunikator dalam usaha menciptakan komunikasi yang efektif. Mengingat dalam proses komunikasi, khalayak itu sama sekali tidak pasif, melainkan aktif. Sehingga antara komunikator dan komunikan bukan saja terjadi saling berhubungan, tapi juga saling mempengaruhi. Hal itu bergantung pada

tujuan komunikasi, apakah agar komunikasi hanya sekedar mengetahui (dengan metode informatif) atau agar komunikasi melakukan tindakan tertentu (metode perusatif). Yang perlu dicermati dalam hal ini meliputi faktor kerangka referensi (*frame of reference*), faktor situasi dan kondisi komunikasi.

Dalam proses komunikasi, baik komunikator maupun khalayak mempunyai kepentingan yang sama. Tanpa persamaan kepentingan, komunikasi tidak akan berlangsung, untuk berlangsungnya suatu komunikasi dan kemudian tercapainya hasil yang positif, maka komunikator harus menciptakan persamaan kepentingan dengan khalayak terutama dalam pesan, metode dan media.

## 2. Menyusun Pesan

Setelah mengenal khalayak langkah selanjutnya adalah menyusun pesan, yaitu menentukan tema dan materi. Syarat utama dalam mempengaruhi khalayak dari pesan tersebut ialah mampu membangkitkan perhatian. Perhatian adalah pengamatan terpusat, karena itu tidak semua yang diamati dapat menimbulkan perhatian. Dengan demikian awal dari suatu efektifitas dalam komunikasi, ialah bangkitnya perhatian dari khalayak terhadap pesan-pesan yang disampaikan. Hal ini sesuai dengan *AA procedure* atau *from Attention to Action procedure*. Artinya membangkitkan perhatian (*attention*) untuk selanjutnya menggerakkan seseorang atau orang banyak melakukan kegiatan (*Action*) sesuai tujuan yang dirumuskan.

## 3. Pemilihan Media Komunikasi

Pemilihan media komunikasi ini dilakukan untuk mencapai sasaran komunikasi. Langkah ini dapat dilakukan dengan menggabungkan salah satu atau gabungan dari beberapa media, bergantung pada tujuan yang akan dicapai, pesan yang disampaikan dan teknik yang digunakan, karena masing-masing medium mempunyai kelemahan-kelemahannya tersendiri sebagai alat.

### **2.4.2 Informasi Dalam Komunikasi**

Dalam ilmu komunikasi, informasi yang disampaikan pada sebuah komunikasi merupakan inti dari komunikasi itu. Message atau pesan memiliki peran yang utama dalam pembentukan komunikasi yang efektif. Pesan dari sumber atau biasa disebut komunikator memiliki peranan di mana hal tersebut merupakan gagasan yang dikemukakan oleh sumber agar diterima dan dimengerti oleh penerima.

Dalam arti luas, message atau pesan berarti informasi yang disampaikan dalam bentuk bahasa lisan, tulisan ataupun simbol yang disepakati. Keberhasilan komunikasi dapat diukur dari pemahaman akan pesan yang disampaikan. Selain itu, perlu dipahami juga mengenai seseorang dalam memahami pesan yang disampaikan. Komunikasi pada dasarnya adalah penyampaian pesan yang dilakukan dari seseorang kepada seseorang lainnya melalui sebuah media penyampaian. Dari definisi tersebut, Pemahaman dan Pengalaman yang berbeda dari tiap orang akan membuat isi dari informasi tersebut berbeda sudut pandang.

Pengolahan message atau pesan sangat diperlukan bagi sebuah organisasi untuk menyampaikan maksud yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk itu, dalam lingkup komunikasi organisasi, pemberian informasi harus terjadi secara merata kepada seluruh bagian agar tidak terjadi perbedaan pemahaman informasi. Sedangkan pemahaman dan pengalaman pun mengandung banyak sekali variabel yang mempengaruhinya. Pemahaman bisa dipengaruhi dari suku, agama, ras, latar belakang pendidikan dan lain hal, sedangkan pengalaman dipengaruhi oleh lamanya terlibat dan lainnya.

### **2.5 Definisi Keselamatan Kerja**

Secara filosofi Keselamatan kerja adalah usaha yang dilakukan oleh setiap orang atau kelompok manusia untuk penjamin kesehatannya dan

keselamatannya untuk mewujudkan masyarakat makmur dan sejahtera. Secara ilmu pengetahuan, merupakan ilmu pengetahuan yang diterapkan oleh manusia untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau meminimalisir akan terjadinya risiko saat kerja (Paskarini, Dkk, 2016 : 12).

Keselamatan kerja adalah penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang diadaptasikan dengan kapabilitas fisiologi dan psikologi dan sebagai adaptasi pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada jabatannya suatu upaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan baik secara fisik, mental dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan diantara pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan pekerja dalam pekerjaannya dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan (Notoadmodjo ,2014 : 9).

Keselamatan kerja adalah suatu hasil pemikiran manusia yang menjamin kesejahteraan jasmani dan rohani setiap manusia yang dituangkan dalam karya berbentuk ilmu pengetahuan yang terstruktur, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Indikator penyebab keselamatan kerja adalah keadaan tempat lingkungan kerja, yang meliputi:

1. Penyimpanan dan penyusunan barang-barang yang berbahaya yang kurang tetap pada posisinya dan membahayakan.
2. Ruang kerja yang terlalu padat.
3. Pembuangan limbah yang tidak pada tempatnya
4. Pemakaian peralatan kerja, yang meliputi:
  - a. Pengaman peralatan kerja yang sudah usang atau rusak
  - b. Penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengaman yang baik

Menurut Sulhinayatullah (2017) keselamatan kerja merupakan susunan upaya yang wujudkan untuk menjaga ketentraman karyawan dalam suatu perusahaan dan kenyamanan kerja saat melakukan

pekerjaan di setiap perusahaan. Menurut International Labour Organization (1980) dalam resolusinya menyatakan bahwa ada tiga prinsip dasar tentang keselamatan kerja:

1. Ketepatan lingkungan yang aman, sehat dan selamat
2. Kondisi pekerjaan harus sesuai dengan pekerja
3. Pekerjaan haruslah sesuatu yang nyata sebagai prestasi individu, pemenuhan kebutuhan secara pribadi dan untuk pelayanan masyarakat umum.

Konsep Keselamatan Kerja ialah upaya pengendalian potensi terjadinya kecelakaan di tempat kerja untuk para karyawan demi terwujudnya kesehatan dan keselamatan kerja untuk seluruh pekerja, meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja merupakan ramuan keilmuan yang disebut konsep keselamatan kerja. Secara umum, keselamatan kerja adalah ilmu dan penerapannya berkaitan dengan mesin, bahan, alat dan perlengkapan lainnya yang diperlukan dalam setiap perusahaan atau pekerjaan yang digunakan secara tepat sasaran demi keselamatan dan kenyamanan kerja para karyawan yang ada dalam lingkungan pekerjaan. (Wahyudi B, 2018 : 13).

Setiap instansi tentu memiliki peraturan-peraturan yang dimana setiap anggota didalamnya wajib mengikuti peraturan tersebut. Termasuk nelayan pada PP Lempasing yang merupakan pemasok hasil tangkap laut . Dalam melakukan kegiatan penangkapan hasil laut dan untuk menjaga keselamatan saat berlayar maka sangat diwajibkan penggunaan perlengkapan yang sudah di anjurkan dalam peraturan. Terkadang ada beberapa orang yang merasa aturan, kebijakan, atau sistem tersebut membuat kerja menjadi tidak nyaman, serba dibatasi, bahkan tidak efisien sehingga mereka menjadi tidak peduli dengan keselamatan kerja. Bagaimana agar orang-orang tersebut dapat tumbuh motivasi dirinya untuk selalu menerapkan system Keselamatan Kerja. Disinilah seorang Humas dengan kemampun sosialisasinya mengkomunikasikan kebijakan atau



aturan keselamatan kerja dengan cara yang rasional dan mudah dipahami, sehingga tidak terkesan memaksa.

## **2.6 Konsep Prilaku**

### **2.6.1 Perilaku Nelayan**

UU No. 31 tahun 1990 tentang perikanan, nelayan adalah SDM yang memegang peranan yang begitu krusial dalam hal kegiatan penangkapan ikan (Moch, 2003: 5). Sedangkan menurut yang lain menyebutkan bahwa nelayan merupakan manusia yang kesehariannya hidup dengan mata pencahariannya untuk hidup dari hasil laut (Sastrawidjaja, 2011 : 11). Oleh karena itu kita dapat menyimpulkan secara gambling bahwa nelayan merupakan orang atau kelompok orang yang menjalani aktivitas hidupnya di laut dengan mengharapkan hasil dari laut untuk hidup menghidupi keluarganya.

Di Indonesia para nelayan biasanya tinggal didaerah pesisir pantai atau laut. Tak banyak ditemui pada masyarakat bahwa hidup jadi nelayan juga memiliki kelompok atau komunitas tersendiri yang diakomudir untuk saling member manfaat. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang mata pencahariannya hasil laut dan tinggal di desa desa dekat pesisir. Komunitas nelayan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain :

1. Segi mata pencaharian, nelayan adalah masyarakat yang segala aktivitas bercocok tanamnya berkaitan dengan lingkungan laut atau pesisir. Atau mereka yang menjadikan aspek perikanan sebagai mata pencaharian pokok untuk mereka.
2. Segi cara hidup, komunitas nelayan merupakan komunitas yang hidup bergotong royong. Kehidupan bergotong royong atau saling tolong menolongsesuatu yang sangat penting pada saat mengatasi keadaan yang menurutnya mengeluarkan biaya besar dan tenaga yang banyak.

3. Segi keterampilan, walau menjadi nelayan merupakan pekerjaan yang cukup berat, tetapi mereka memiliki keterampilan yang sederhana dari turun temurun diajarkan oleh nenek moyang mereka.

Bagi masyarakat yang pekerjaannya sebagai nelayan, kegiatan menangkap ikan dan mengeleloh sumber daya laut, bukan sekedar rutinitas semata untuk tumpuan ekonomi tetapi juga ditempatkan sebagai kebulatan tekad yang member arti tujuan hidup secara luas dan memiliki prinsip masing-masing (Rontuboi, 2015 : 12).

### **2.6.2 Perilaku Keselamatan Kerja**

Setiap pekerjaan memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda termasuk melaut oleh nelayan, bahwa keselamatan kerja merupakan suatu usaha dan upaya menciptakan keamanan dan perlindungan diri dari risiko yang kemungkinan menimpah pada pekerjaan kita (Santosa, dkk, 2017 : 10).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa fungsi dari kesehatan dan keselamatan kerja yaitu, identifikasi dan melakukan penilaian terhadap risiko dari bahaya tempat kerja, memberikan saran terhadap perencanaan, pengorganisasian dan desain tempat kerja, memberikan saran informasi pelatihan dan edukasi tentang keselamatan kerja, kerja merupakan suatu usaha dan upaya melindungi diri dan keamanan dari risiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional. Konsep kesehatan dan keselamatan kerja sangat dekat dengan istilah kecelakaan kerja, sebab dengan manajemen prosedur maka tingkat risiko kecelakaan dapat diminimalisir tanpa mendahului kehendak tuhan, kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik fisik, materi dan bahkan dapat menelan korban jiwa (Putra, dkk, 2017 : 10).

Kecelakaan kerja dapat juga didefinisikan sebagai suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula dapat menimbulkan korban

manusia dan atau harta benda yang ditempanya, oleh karena pengertian diatas maka ada 3 hal pokok yang perlu diperhatikan.

1. Kecelakaan merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki oleh siapapun.
2. Kecelakaan mengakibatkan kerusakan harta dan kerugian jiwa.
3. Kecelakaan biasanya terjadi akibat adanya kontak dengan sumber energy yang melebihi ambang batas tubuh dan struktur.

## **2.7 Identifikasi Potensi Bahaya Pada Nelayan**

Kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan di Lempasing mempunyai lingkungan kerja yang berbahaya maka dari itu perlu diawasi. Karena memiliki potensi bahaya, langkah-langkah pencegahan harus dilakukan untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan potensi risiko bahaya atau kecelakaan tersebut. Menurut Suma'mur (1995), definisi kecelakaan adalah kejadian tidak terduga dan tidak diharapkan yang dapat menimbulkan cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Langkah-langkah dalam meningkatkan standar keselamatan dalam usaha perikanan terus dilakukan, tetapi standar keselamatan kapal perikanan tetap saja masih lebih rendah dibandingkan dengan kapal komersial lainnya.

Keselamatan merupakan segala sarana dan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kecelakaan kerja. Peningkatan standar keselamatan juga diikuti dengan meningkatnya biaya untuk memenuhi standar tersebut. Solusi mudah untuk masalah ini diantaranya adalah memastikan kapal 'layak laut', awak yang kompeten, alat-alat keselamatan yang cukup, serta kesadaran baik nelayan maupun pihak pengelola perikanan untuk menerapkan prosedur-prosedur keselamatan.

Sebuah penelitian tentang keselamatan kerja di laut Indonesia, dilakukan dengan mengambil contoh dari 66 unit kapal perikanan di Tegal (pukat tarik), Pekalongan (pukat cincin) dan Cilacap (longline mini dan jaring insang). Hasilnya menunjukkan bahwa 68 orang nelayan meninggal dunia karena kecelakaan di laut. Kecelakaan yang terjadi antara lain ; kapal tenggelam (46%), tercebur ke laut (27%), sakit dan kelelahan (20%) serta kecelakaan ketika operasi penangkapan ikan (7%). Kecelakaan yang terjadi ketika operasi penangkapan ikan dilakukan dapat disebabkan oleh kurangnya kompetensi nelayan dalam mengoperasikan alat tangkap, kurang atau tidak adanya informasi dan latihan penanggulangan keadaan darurat serta kurangnya penerangan dalam operasi penangkapan ikan di malam hari (Suharyanto, 2016 : 11).

Aktivitas nelayan Pulau Saugi pada saat penelitian, secara urut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**

**Aktivitas Nelayan Pada Pelabuhan Pantai Lempasing**

No	Aktifitas
1	Persiapan di darat
2	Bongkar muat ( Pemandahan barang kedalam kapal )
3	Berlayar menuju daerah penangkapan Kepiting dan Ikan
4	Persiapan alat tangkap Pukat (puka') dan Rakang (Rakkang)
5	Pengoperasian alat tangkap Pukat (puka') dan Rakang (Rakkang), penurunan Pukat (puka') dan Rakang (Rakkang)
6	Pengangkatan Pukat (puka') dan Rakang (Rakkang)
7	Berlayar menuju kampung asal
8	Bongkar muat hasil tangkap

Urutan langkah kerja dalam setiap aktivitas operasi nelayan di Pelabuhan Lempasing dimasukkan dan kemudian dianalisis potensi bahaya yang

mungkin timbul serta tindakan pencegahan apa yang perlu dilakukan untuk menghilangkan atau meminimalisir potensi bahaya tersebut.

### 1. Persiapan Di Darat

Aktivitas Nelayan Pelabuhan Lempasing yang pertama yaitu persiapan di darat, dimana pemilik kapal beserta nelayan mempersiapkan kebutuhan melaut. Salah satunya aktivitas persiapan di darat yang memiliki potensi bahaya yaitu persiapan perahu.

**Tabel 2.2**

Identifikasi Potensi Bahaya pada Aktivitas Persiapan di Darat

No	Urutan Kegiatan	Potensi Bahaya	Pencegahan
1	Pengecekan peralatan dan kebutuhan melaut	Kurangnya perbekalan	Membuat checklist
2	Persiapan BBM	- Jirigen jatuh mengenai anggota tubuh - bocor/rusaknya jirigen -	-Memakai Alat Pelindung Diri (APD) -Mengecek kelayakan jirigen
3	Persiapan mesin	-Rusak mesin - Kunci pas jatuh mengenai anggota tubuh	-Service rutin - Memakai APD
4	Pengecekan alat jaring, Rakang dan Pukat (Jala, Rakkang dan Puka')	Tercebur ke laut	Memakai APD

## 2. Pemindahan (Loading) Ke Atas Kapal

Pemindahan ke atas kapal pada aktivitas nelayan Pulau Saugi masih dikatakan sangat minim peralatan keselamatan bagi nelayan. Ketika nelayan memindahkan mesin kapal hanya dengan alat bantu dari bambu. Untuk lebih jelasnya dari urutan kegiatan pemindahan perlengkapan dan kebutuhan melaut pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**

Identifikasi Potensi Bahaya pada Aktivitas Bongkar muat ( Pemindahan barang kedalam kapal )

No	Urutan Kegiatan	Potensi Bahaya	Pencegahan
1	Pemindahan dan pemasangan motor tempel ke kapal	- Tangan terluka - Bahu memar - Terbentur - Tergelincir - Mesin jatuh mengenai anggota tubuh	- Memakai APD - Membersihkan jalan yang dilalui - Menggunakan katrol
2	Pemindahan jirigen BBM dan oli	-Terbentur -Jirigen jatuh mengenai anggota tubuh - Tergelincir -Nelayanjatuh ke laut	- Memakai APD - Membersihkan jalan yang dilalui

## 3. Berlayar Menuju Daerah Penangkapan

Peralatan dan kebutuhan melaut sudah dipindahkan ke atas kapal dilanjutkan dengan berlayar menuju daerah penangkapan. Pada aktivitas ini yang memiliki risiko bahaya yaitu pada nelayan mengarahkan kapal keluar dari daratan. Urutan kegiatan berlayar menuju daerah penangkapan dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.4**

Identifikasi Potensi Bahaya pada Aktivitas Berlayar Menuju Daerah Penangkapan

No	Urutan Kegiatan	Potensi Bahaya	Pencegahan
1	Melepas tali Tambat kapal	- Tangan terluka - Terbentur - Nelayan tercebur	- Memakai APD
2	Menyalakan mesin	- Tangan terluka - Nelayan tercebur ke perairan - Gangguan pernapasan akibat asap dari mesin	- Memakai APD - Memakai pelampung - Memakai masker
3	Mengarahkan Kapal keluar menuju daerah penangkapan	- Menabrak kapal lain - Kapal bocor/tenggelam – Baling mesin tersangkut sampah - Hilang arah	- Mengarahkan kapal - Mengecek kelayakan kapal - Menjaga kebersihan laut - Membawa GPS

**4. Persiapan Alat Tangkap Jaring (Jala'), Pukat dan Rakang**

Persiapan alat tangkap dilakukan ketika perjalanan menuju daerah penangkapan, seperti menurunkan Pukat dan Rakang dan di simpan selama 1x24 jam/1x12 jam. Cara pengoperasiannya adalah dengan cara memasang rakang dan pukat di daerah yang dianggap banyak kepitingnya dengan jarak beberapa meter setiap alat tangkap dengan umpan bervariasi. Pada kegiatan ini risiko bahaya yang timbul yaitu nelayan dapat tercebur ke laut, untuk secara rinci urutan kegiatan dan risiko bahayanya yaitu:

**Tabel 2.5**

Identifikasi Potensi Bahaya pada Aktivitas Persiapan Alat Tangkap Jaring (jala), Pukat (puka'), dan Rakang (Rakkang)

No	Urutan Kegiatan	Potensi Bahaya	Pencegahan
1	Menurunkan Rakang	- Tangan terluka - Kedinginan -	- Memakai APD -Memakai jaket

		Apabila terjadi hujan petir dapat tersambar petir/terkena air hujan	- Dipasang alat penangkal petir
2	Menyusun Rakang	- Tangan terluka - Kedinginan	- Memakai APD - Memakai jaket - Dipasang alat penangkal petir

### 5. Penurunan Rakang (Rakkang)

Proses penangkapan ikan atau kepiting oleh nelayan dengan penurunan jaring dengan perlahan dan secara manual atau tanpa alat bantu. Proses ini memiliki risiko bahaya, untuk lebih lengkapnya urutan kegiatan dan risiko bahaya dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.6**

Identifikasi Potensi Bahaya Pada Aktivitas Penurunan Alat Tangkap

No	Urutan Kegiatan	Potensi Bahaya	Pencegahan
1	Penarikan tali rakang	- Nelayan tercebur ke laut - Alat jatuh mengenai anggota tubuh	- Memakai APD - Menyediakan ban pelampung - Dilakukan perlahan

### 6. Pengangkatan Rakang (Rakkang)

Operasi penangkapan ikan maupun kepiting dilakukan tanpa alat bantu apapun, pada saat pengangkatan alat tangkap berupa jaring dan rakang maupun pukat, memiliki risiko bahaya seperti tangan nelayan dapat terluka.

**Tabel 2.7**

Identifikasi Potensi Bahaya Pada Aktivitas Pengangkatan Alat Tangkap

No	Urutan Kegiatan	Potensi Bahaya	Pencegahan
1	Pengambilan tali rakang (rakkang), pukat (puka')	- Nelayan tercebur ke laut - Alat jatuh mengenai anggota tubuh	- Menyediakan ban pelampung - Memakain APD

2	Merapikan tali rakang (rakkang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tangan terluka</li> <li>- Nelayan tercebur ke laut</li> <li>- Alat jatuh mengenai anggota tubuh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memakai APD</li> <li>- Menyediakan banpelampung</li> <li>- Dilakukan perlahan</li> </ul>
---	------------------------------------	---	---

## 7. Berlayar Pulang

Operasi penangkapan ikan maupun kepiting yang dilakukan dan hasil tangkapan sudah memenuhi dan mendapatkan hasil tangkapan. Aktivitas dilanjutkan dengan nelayan mengarahkan menuju kembali ke pelabuhan, selama perjalanan kegiatan-kegiatan dan risiko bahaya yang timbul dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.8**

Identifikasi Potensi Bahaya pada Aktivitas Berlayar Menuju pelabuhan

No	Urutan Kegiatan	Potensi Bahaya	Pencegahan
1	Mengarahkan kapal menuju kampung asal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilang arah</li> <li>- Kapal terbalik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa GPS atau radio control</li> <li>- Pengecekan rutin</li> </ul>
2	Merapikan alat tangkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tangan terluka</li> <li>- Terbentur</li> <li>- Tergelincir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memakai APD</li> <li>- Memakai pelampung</li> </ul>

## 8. Penurunan Hasil Tangkapan

Pemindahan atau penurunan dari atas kapal nelayan diutamakan tempat hasil tangkapan yang diturunkan yang berisi hasil tangkapan. Aktivitas ini menimbulkan risiko bahaya, seperti karung atau alat lainnya jatuh mengenai nelayan. Rincian kegiatan dan risiko bahaya pada aktivitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.9**

Identifikasi Potensi Bahaya pada Aktivitas Unloading Hasil Tangkapan

No	Urutan Kegiatan	Potensi Bahaya	Pencegahan
1	Memasang tali tambat kapal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tangan terluka</li> <li>- Terbentur</li> <li>- Tergelincir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memakai APD</li> <li>- Membersihkan lantai kapal</li> </ul>

2	Pemindahan barang bawaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tangan terluka</li> <li>- Terbentur</li> <li>- Tergelincir</li> <li>- Karung terjatuh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membersihkan kapal</li> <li>- Menggunakan alat bantu katrol</li> </ul>
---	--------------------------	---	---

## 2.6 Mekanisme Penanganan Kecelakaan Kerja

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan pengawasan terhadap orang, mesin, material dan metode yang mencakup lingkungan kerja yang tidak mengalami cedera. Kecelakaan kerja terjadi dimana saja dengan kualitas yang berbeda-beda, setiap nelayan mendapatkan kecelakaan kerja dengan tingkat risiko yang berbeda-beda pula, hal ini tergantung tujuan, cara dan lingkup tugas dalam menangkap ikat bagi seorang sawi atau pekerja yang mengkap ikan di laut

Prosedur yang benar ketika nelayan hendak melaut maka mesti memiliki kesiapan yang matang dengan segala persiapan baik perahu alat tangkap sampai dengan persiapan obat jikalau terjadi kecelakaan di tengah laut pada saat melaut, memperhatikan cuaca dan perlengkapan lainnya secara matang adalah hal yang prioritas harus diperhatikan sebelum melaut

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

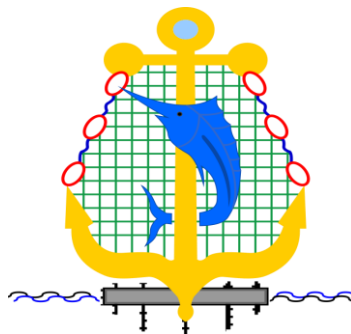
#### **3.1 Profil Instansi**

##### **3.1.1 Sejarah Singkat Instansi**

Syahbandar yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Provinsi Lampung khususnya yang dikelola oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang pelayanan. Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pelabuhan Perikanan (UPTD-PP) ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2001 yang berkedudukan di Jl. RE. Martadinata KM. 6, Desa Lempasing, Kec Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Maksud dan Tujuan dari pendirian ini adalah sebagai suatu pelayanan untuk dilakukannya pengawasan sekaligus penegakan hukum. Dan sesuai menurut tugas syahbandar yang ditentukan yaitu “mengoordinasikan dan melaksanakan keselamatan dan keamanan pelayaran” maka syahbandar melaksanakan inpeksi atas kapal-kapal yang datang, meliputi pemeriksaan dan pengujian kondisi fisik bangunan kapal, serta dokumen surat surat dan sertifikat kapal

##### **3.1.2 Logo Pelabuhan Perikanan**

a. Logo :



*Gambar 1 Logo Pelabuhan Perikanan (Website Resmi)*

### 3.2 Visi dan Misi

#### A. Visi

VISI dari UPTD Pelabuhan Perikanan (PP) Lempasing yaitu :

Terwujudnya Pelabuhan Perikanan Pantai sebagai pusat pelayanan dan bisnis perikanan secara terpadu”, sejalan dengan visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yaitu :

Terwujudnya Kelautan dan Perikanan Yang Unggul dan Berdaya saing Serta Berkelanjutan”, maka untuk mewujudkan Visi tersebut, UPTD Pelabuhan Perikanan (PP) Lempasing memiliki MISI.

#### B. Misi

Untuk mencapai VISI tersebut UPTD PP Lempasing memiliki MISI sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan dan menjadikan sentra bisnis usaha perikanan terpadu dalam peningkatan konsumsi ikan, penyediaan bahan baku industry.
2. Meningkatkan kualitas mutu dan harga ikan yang didaratkan dan distribusi ke daerah pendaratan.
3. Memberikan kesempatan berusaha yang sama dan searah serta iklim yang kondusif.
4. Meningkatkan mutu, pemasaran, distribusi dan nilai tambah hasil perikanan.
5. Mewujudkan pusat data dan informasi perikanan.
6. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab.

### 3.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara fungsi yang terdapat dalam suatu organisasi. Struktur organisasi sangat penting sekali bagi instansi karena dengan adanya struktur organisasi memudahkan dalam mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dalam menyusun struktur organisasi hendaklah jelas tujuan dan sasaran dari instansi, dan siapa yang mempunyai wewenang atas setiap bagian dari pekerjaan.

Struktur organisasi pada kantor UPTD PP Lempasing sangat bervariasi disesuaikan dengan tingkatan.

1. Kepala Pelabuhan UPTD PP Lempasing
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Bagian Pengusahaan
4. Seksi Sarana Dan Prasarana (Syahbandar)

Dalam tingkatan, kepala memiliki tanggung jawab akan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pemeliharaan hubungan dengan komunitas, serta monitoring kegiatan,. Berikut ini tugas dari masing-masing bagian, yaitu:

#### a. Kepala Pelabuhan

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan fungsi teknis pengelolaan dan pelayanan pelabuhan perikanan, serta keselamatan operasional kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Lempasing serta pembinaan pada pelabuhan perikanan di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran, yang berkedudukan di Lempasing Bandar Lampung.

#### b. Sub Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas penyiapan dan melaksanakan urusan kearsipan, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, serta penyusunan program dan laporan kinerja UPTD



Pelabuhan Perikanan Lempasing dan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

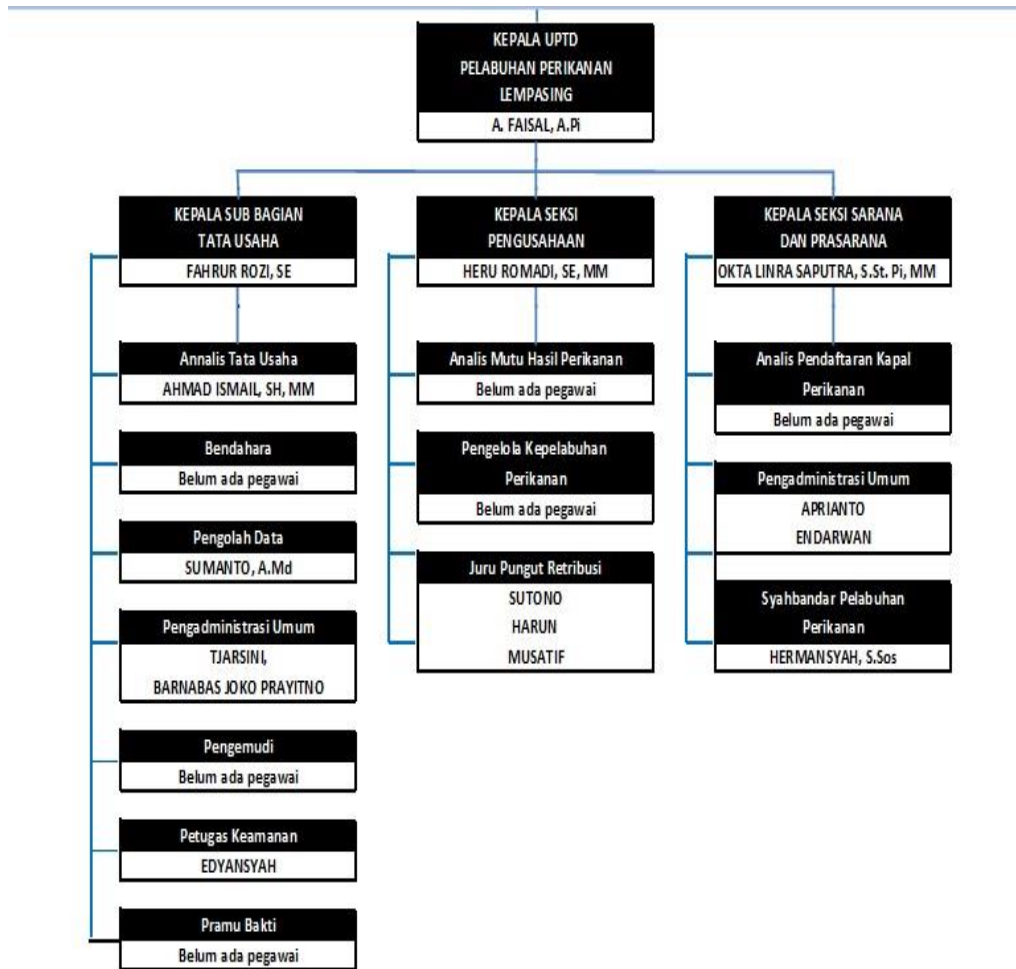
**c. Seksi Pengusahaan**

Menyiapkan dan melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian serta pendayagunaan sarana dan prasarana, pembinaan mutu, pemasaran dan distribusi, pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha, dan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**d. Seksi Sarana Dan Prasarana (Syahbandar)**

Seksi Sarana dan Prasarana atau Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan serta kegiatan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing, dan pembinaan pada pelabuhan perikanan di Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.

## STRUKTUR ORGANISASI



*Gambar 2 Struktur UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing*

### 3.4 Tugas dan Kewenangan Syahbandar

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Syahbandar Pelabuhan Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Berdasarkan Penjelasan Pasal 42 ayat (1). Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah Syahbandar yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran. Syahbandar di pelabuhan perikanan dalam melaksanakan tugasnya, berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelabuhan Perikanan.

Tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan telah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun, setelah ada perubahan pertama undang-undang perikanan, maka tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan diubah dan diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk Syahbandar di pelabuhan perikanan yang mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut :

### **1. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar**

Surat persetujuan berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, dan laik simpan. Surat persetujuan berlayar berlaku 24 jam sejak diterbitkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.

### **2. Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan**

Dalam mengatur kedatangan kapal perikanan berdasarkan pemberitahuan rencana kedatangan dari nakhoda atau pemilik kapal untuk dapat melakukan pendaratan kapal di pelabuhan dan bongkar muat sehingga bisa mengontrol keberangkatan kapal juga

### **3. Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan**

Dilakukan untuk melihat kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal ketika bersandar dan tiba di pelabuhan perikanan

#### **4. Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan**

Pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Lempasing, dilakukan bersama dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan pada saat proses penerbitan surat laik operasi (SLO). Hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan dituangkan dalam hasil pemeriksaan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal perikanan ketika mengajukan permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar di Pelabuhan Perikanan Lempasing

#### **5. Memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut**

Syahbandar di pelabuhan perikanan mengesahkan perjanjian kerja laut setelah ditandatangani oleh pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dengan nakhoda dan anak buah kapal.

#### **6. Memeriksa log book penangkapan dan pengangkutan ikan**

Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa log book penangkapan ikan pada saat kapal perikanan bersandar dan tiba di pelabuhan perikanan. Hasil pemeriksaan log book penangkapan ikan disampaikan kepada kepala pelabuhan perikanan.

#### **7. Mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan**

Bagi kapal perikanan yang memasuki Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing untuk tambat atau labuh, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing telah menentukan penempatan kapal perikanan di dermaga sesuai dengan jenis kapalnya,

#### **8. Mengawasi pemanduan**

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing tidak melaksanakan pengawasan pemanduan terhadap kapal perikanan yang akan masuk dan keluar pelabuhan perikanan. Kapal perikanan yang akan berlayar, dapat berangkat sendiri sewaktu-waktu setelah mendapatkan surat persetujuan berlayar dari Syahbandar

#### **9. Mengawasi pengisian bahan bakar**

Dalam pengawasan pengisian bahan bakar, dilakukan dengan memberikan surat izin pengisian bahan bakar bagi kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Lempasing. Pengajuan izin pengisian bahan bakar dilakukan sebelum penerbitan surat persetujuan berlayar

#### **10. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan**

Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas di pelabuhan perikanan yang terkait dengan keselamatan operasional kapal perikanan.

#### **11. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan**

Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan sebagai tindakan awal operasi pencarian dan penyelamatan terhadap musibah pelayaran serta memberikan bantuan terhadap bencana dan musibah lainnya di pelabuhan perikanan.

#### **12. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan**

Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman

kebakaran di pelabuhan perikanan, dengan cara meminimalkan risiko pencemaran dan kebakaran.

### **13. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime**

Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim sebagai upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.

### **14. Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan**

Kapal perikanan yang akan meninggalkan pelabuhan perikanan, harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan pengawakan kapal perikanan. Jika tidak dilakukan maka kapal tidak diperbolehkan berlayar

### **15. Menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan**

Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang untuk menerbitkan surat tanda bukti laporan kedatangan untuk di tindak lanjuti sebagai syarat keberangkatan kapal

### **16. Memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.**

Pemeriksaan sertifikat dilakukan dengan cara melihat keaslian dan keabsahan sertifikat ikan hasil tangkapan dengan dokumen yang dinotifikasi ke wilayah tujuan.

## **3.5 Prosedur Dalam Berlayar**

Salah satu pelayanan publik yang dilaksanakan di pelabuhan perikanan seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO 32/PERMENKP/2014 adalah pelayanan penerbitan SPB(Surat

Persetujuan Berlayar) yang harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku di lingkungan KKP RI (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia). Dalam proses penerbitannya, pelayanan penerbitan SPB terdiri atas beberapa tahap yang melibatkan nahkoda/ pemohon SPB dan juga para petugas pelayanan dengan waktu yang bervariasi setiap tahapnya.

Menurut UU Nomor 17 tahun 2008, SPB diterbitkan dengan tujuan sebagai kontrol pemerintah untuk menjamin keselamatan operasional kapal perikanan sebagai wujud dari pelaksanaan tugas Syahbandar dalam rangka melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran termasuk pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan perairan, kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritim dipelabuhan. SPB sebagai salah satu dokumen yang wajib dimiliki kapal perikanan yang akan berlayar tentu menjadi salah satu kegiatan pelayanan wajib dilaksanakan di Pelabuhan Lempasing.

Pelayanan SPB Pelabuhan Lempasing dilakukan di pos pelayanan terpadu. Pengurusan dilakukan melalui loket PNBPN untuk membayar jasa tambat labuh, kemudian ke loket PSDKP (Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan) untuk mengurus SLO (Surat Laik Operasi), Kamla (Keamanan Laut) yang terdiri dari TNI AL dan Polair untuk mengisi identitas kapal pada buku lapor kedatangan kapal, dilanjutkan ke kantor kesehatan pelabuhan untuk memeriksa status kesehatan nahkoda dan kapal, setelah itu SPB akan dilanjutkan pengurusannya kepada Syahbandar. Untuk penerbitan SPB, pemohon harus mengisi surat permohonan dan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan seperti :

- Surat pernyataan nahkoda
- Tanda bukti pembayaran jasa kepelabuhanan 7
- SLO
- Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal

(STBLKK)

- Buku kesehatan (health book)
- Daftar ABK
- Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
- Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
- Pas tahunan
- Surat Kecakapan Nahkoda
- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal

Setelah semua berkas diperiksa maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik kapal menggunakan form checklist untuk memeriksa kesesuaian pada dokumen dengan yang ada pada kapal secara langsung. Setelah semua pemeriksaan selesai maka SPB akan diterbitkan oleh Syahbandar dan berlaku selama 1 x 24 jam di kolam pelabuhan

Di dalam pengajuan Penerbitan SPB memiliki beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon, yang akan dijabarkan sebagai berikut :

- Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), secara umum memuat informasi identitas perusahaan, identitas kapal, jenis kapal/ alat penangkapan ikan, spesifikasi kapal, daerah penangkapan dan pelabuhan penangkapan serta masa berlaku surat izin tersebut.

- Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), secara umum memuat informasi identitas perusahaan, jenis kegiatan, kapal dan daerah usaha (jenis, ukuran, dan jumlah, daerah penangkapan, pelabuhan pangkalan, pelabuhan muat/singgah) dan masa berlaku surat tersebut

- Surat Izin Laik Operasi (SLO), secara umum memuat informasi bahwa kapal dinyatakan laik untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan (laiktangkap). Dalam SLO tercantum identitas perusahaan, kapal (nama, jenis, ukuran), nomor dan masa berlaku SIPI.



- Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (STBLKK), secara umum memuat informasi tentang kedatangan dan rencana keberangkatan kapal sehingga lalu lintas pergerakan kapal di kolam pelabuhan terpantau. STBLKK berisi informasi seperti: identitas perusahaan, identitas kapal, alat penangkapan ikan, tanggal keberangkatan kapal, jumlah awak kapal, dan nahkoda kapal. Pas tahunan merupakan surat tanda kebangsaan kapal yang terbagi atas dua macam yaitu: Pas Kecil diperuntukkan bagi kapal berukuran  $< 7$  GT yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pas Besar diperuntukkan bagi kapal berukuran  $>7$  GT yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan

- Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda yaitu surat yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan yang menerangkan bahwa Nahkoda sesuai dengan identitas yang tertera pada surat tersebut telah dinyatakan lulus kompetensi dan telah menguasai cara membawa kapal berlayar dengan batasan sesuai GT kapal dan jarak pelayaran yang diijinkan/ tertulis pada surat tersebut

- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan yaitu sertifikat yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan yang menyatakan bahwa kapal sudah diperiksa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan aturan kelaikan kapal yang berlaku dan aturan perundangan lainnya yang terkait kepada kelaikan dan pengawakan kapal perikanan.

- Buku Kesehatan (Health Book) yaitu buku yang berisi status kesehatan kapal dan juga Nahkoda yang telah diperiksa oleh bagian Kesehatan Pelabuhan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Penyampaian Informasi Keselamatan Nelayan dalam Berlayar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Strategi Humas yang dilakukan Dinas Perikanan dan Syahbandar Kecamatan Lempasing yaitu dengan strategi komunikasi informasi dengan melakukan penyampaian informasi serta sosialisasi berupa Pemahaman pentingnya keselamatan nelayan dalam berlayar ternyata dapat di pahami serta di mengerti oleh para nelayan Kecamatan Lempasing. Terbukti bahwa para nelayan memahami prosedur-prosedur sebelum dan sesudah berlayar yang wajib mereka lakukan. Tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat mereka hindari yakni kerusakan pada kapal yang terjadi secara tiba-tiba di tengah laut. Dikarenakan pada saat sebelum berangkat berlayar tidak adanya petugas dari pihak UPTD PP Lempasing Syahbandar yang memeriksa secara khusus guna pengecekan kapal. Sehingga pengecekan kapal di lakukan oleh para nelayan itu sendiri. Pentingnya petugas dalam pengecekan kapal bukan hanya pemeriksaan secara fisik kapal saja, melainkan alat-alat berlayar seperti pelampung, pengecekan radio, serta yang lainnya. Hal lainnya yang tidak dapat mereka hindari tetapi sebenarnya mereka pahami ialah masalah cuaca. Para nelayan yang akan berlayar tentunya pada saat mendaftar akan melihat perkiraan cuaca yang ada pada kantor Syahbandar. Tetapi sebagian nelayan tidak menjadikan perkiraan cuaca tersebut sebagai salah satu upaya keselamatan dalam berlayar. Karena sebagian besar nelayan harus tetap berlayar demi memenuhi kebutuhan rumah walaupun berlayar dengan cuaca yang buruk serta resiko yang tinggi.

Strategi Humas Dinas Perikanan dan Syahbandar Kecamatan Lempasing dalam penyampaian informasi yaitu dengan cara melakukan komunikasi terbuka berupa sosialisasi, pemberian berbagai macam keperluan yang di perlukan oleh masyarakat nelayan serta melakukan publikasi. Komunikasi terbuka dilakukan dengan tujuan untuk membangun hubungan dengan mendengarkan masukan dari masyarakat nelayan sehingga keluhan ataupun keperluan masyarakat nelayan dapat di aspirasikan .Kemudian hubungan dengan instansi yang terlibat dalam kegiatan tersebut akan terciptanya reputasi serta hubungan kerjasama yang baik.

## **5.2 Saran**

1. Penyebaran informasi mengenai pentingnya keselamatan berlayar belum merata ,sehingga diharapkan pihak syahbandar maupun UPTD PP Lempasing gencar melakukan sosialisasi sampai semua masyarakat nelayan paham mengenai maksud dari keselamatan berlayar
2. Mendorong pemerintah pusat untuk menambahkan anggran daerah tersebut sehingga dapat berjalan optimal dalam memprioritaskan peningkatan bantuan nseperti pelampung dan alat pelindung diri lainnya yang di butuhkan nelayan
3. Di Segerakannya petugas khusus lapangan guna memeriksa kapal yang akan berlayar/ yang datang

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Arni Muhammad, 2002, *Komunikasi Organisasi*. Jakarta, Bumi Aksara, Jakarta.

Anggoro M.Linggar, 2000, *Teori dan Profesi Kehumasan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Notoatmodjo, 2014, *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Edisi revisi.  
Jakarta: Rineka Cipta

Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta:  
Rineka Cipta.

Purwanto, H. 2019. *Pengantar Perilaku Manusia untuk Keperawatan*. Jakarta:  
Penerbit Buku Kedokteran EGC.

### Skripsi

Qisthifanny. (2021). *Perilaku Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Nelayan Etnik Bugis Di Pulau Saugi Kabupaten Pangkep*. (Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Alauddin Makasar).

Driaskoro ,Budi. (2020). *Peningkatan Kesadaran Penggunaan Alat Keselamatan Pelayaran Bagi Nelayan Di Kabupaten Musi Banyuasin*. (Skripsi Fakultas teknologi nautika politeknik Palembang).

Khairi Akhmad, (2017). *“Analisis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan. Kominikasi dan informatika dalam pengawasan alat penyebrangan kempang dikabupaten kepulauan meranti, (Pekanbaru: Skripsi Uin Sultan Syarif Kasim.)*

**Jurnal**

Ari Dimas Dharmawirawan, Modjo Robiana, 2012. *Identifikasi Bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Penangkapan Ikan Nelayan Muroami*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, Vol. 6, No. 4.

Danandjaja, 2011, *Peran Humas Dalam Perusahaan*, Graha Ilmu, Jakarta.

Ekasari, Dewi, 2018, *Analisis Risiko Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil di Palabuhanratu*. Jurnal. Bogor : Institut Pertanian Bogor.

Fajar, Marhaeni, 2009, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Galang Surya Gumilang. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling*. Jurnal Fokus Konseling Volume 2 No. 2, Agustus 2016.

Jusmawati, A. Arsunan Arsin, Furqaan Naiem, 2016, *Faktor Risiko Kejadian Decompression Sickness Pada Masyarakat Nelayan Peselam Tradisional Pulau Saponda*

Mukarom, Zaenal, 2015, *Manajemen Pelayanan Publik*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Notoatmodjo, (2014), *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Onong, Uchjana, 2007, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* , Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Paskarini, Indriati dan Rinanda, Friendika, 2014, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Selamat Pada Pengemudi Pengangkut Bahan Kimia Berbahaya Pt Aneka Gas Industri, Sidoarjo*. Fakultas Kesehatan

*Masyarakat Universitas Airlangga. Jurnal Kesehatan Dan Keselamatan Kerja. Vol. 3. No. 1. Jan-Jun 2014: 58-70.*

Purwangka Fis, Hersi Sugeng Wisudo, H. Budhi Iskandar, Haluan John, 2016. *Identifikasi Potensi Bahaya dan Teknologi Keselamatan Kerja Pada Operasi Perikanan Payang di Pelabuhan Ratu Jawa Barat*, Jurnal Kelautan Nasional, Vol. 8, No. 2.

Rahman Kirfandi, Fatmawaty Mallapiang, Suharni A. Fachri, Sc Hasriwiani Habo Abbas, 2018, *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Sebelum Melaut Pada Nelayan Penangkap Ikan Di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara.*

Sastrawidjaya, dkk, 2002, *Nelayan Nusantara, Pusat Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Jakarta.

Santoso, G 2004, *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Suko Pratomo, "Pengaruh Strategi Penyuluhan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepedulian Kesehatan Lingkungan," *Metodik Didaktik* Vol.9 (2), 2015

Sulhinayatillah, 2017, *Factors Relating to Occupational Accidents at Crumb Rubber Production Workers. Journal Internasional Of Hygiene and Occupational Health. Vol. 2, No.1. ISSN 2532-4527*

Wahyudi, S dkk, 2018, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Investigasi Kecelakaan Kerja. Modul e-learning Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia, LP2K TTI.*

## **Website**

<https://media.neliti.com/media/publications/59543-ID-tugas-dan-tanggung-jawab-syahbandar-dala.pdf>. Diakses pada 2 Desember 2021

[https://pipp.djpt.kkp.go.id/profil\\_pelabuhan/1344/informasi](https://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/1344/informasi) diakses tanggal 10 Desember 2021

<https://jdih.kkp.go.id/peraturan/3-permen-kp-2013-ttg-kesyahbandaran-di-pelabuhan-perikanan.pdf> diakses tanggal 10 Desember 2021